

CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

' MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF "

1. AKSELERASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
2. EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL DAERAH YANG DIDUKUNG INTEGRASI EKONOMI DIGITAL

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SERTA PELESTARIAN KEBUDAYAAN
2. AKSELERASI PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS ESKTORAL

1. TENAGA KERJA YANG KOMPOTEN DAN BERDAYA SAING
2. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI

TENAGA KERJA YANG KOMPOTEN DAN BERDAYA SAING SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI

Indikator : 1. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

1. MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Indikator : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Cakupan kepesertaan Jaminana Sosial Ketegakerjaa
2. MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI
Indikator : Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri
3. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUTABEL
Indikator : Nilai Sakip (Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

**VISI
RPJMD**

**MISI 2 DAN
MISI 3
RPJMD**

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

**TUJUAN IKU
DISPERINAKER**

**SASARAN IKU
DISPERINAKER**

Urusan Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas

Indikator : Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya

Kegiatan :

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi

Indikator : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sub Kegiatan

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n

2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangkai optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun n

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator : Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Indikator :Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Makro

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Indikator :Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja Makro

Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri

1. **Kegiatan :**Pelayanan antar kerja didaerah Kab/kota

Indikator : Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja

Sub Kegiatan

1. **Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan**

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD

2. **Perluasan Kesempatan Kerja**

Indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

- 2 **Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas informasi pasar kerja

Sub Kegiatan

JOB FAIR/ Bursa Kerja

Indikator : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja

Program Hubungan Industrial

Indikator : Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial

1. **Kegiatan :** Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota

Indikator : Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan

Indikator : Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta dan Sostek serta pengupahan

2. **Kegiatan :** Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Prosentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial

Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Indikator : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan

Urusan Perindustrian

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Indikator : Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan
Sub Kegiatan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Indikator : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Indikator : Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan
Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator : Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional)
Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)